



## Komitmen Pembangunan: *Kick-off* COREMAP-CTI di Papua Barat

**Kegiatan *Kick-off Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative World Bank (COREMAP-CTI WB)* dengan tema “Melestarikan Terumbu Karang untuk Kesejahteraan Masyarakat” dilaksanakan pada 13 November 2020 bertempat di Hotel Swissbel, Sorong, Papua Barat.**

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Secara simbolis Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas meresmikan program COREMAP-CTI WB di Provinsi Papua Barat dengan memukul alat musik tifa, peresmian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong kerja sama antar pihak dan pelibatan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program.

Suharso Monoarfa mengatakan, upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2025 dalam pembangunan

kelautan dan perikanan, Bappenas berperan sebagai *enabler* bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat melalui pendekatan *convergence* dimana Bappenas menjadi wadah dalam membuat percontohan pembangunan partisipatif.

Hal ini diimplementasikan dalam bentuk *pilot project* seperti yang akan dilakukan saat ini melalui COREMAP-CTI, dimana Papua Barat dalam hal ini wilayah Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu lokasinya. Pada akhirnya, *pilot project* ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak.

Acara ini juga dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi & Pembangunan Setda Papua Barat serta unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Selain *kick off* di Sorong, dilakukan juga kunjungan ke lokasi program COREMAP-CTI di Suaka Alam Perairan Waigeo Sebelah Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi terkini dari sarana dan prasarana penunjang ekowisata dan aksesibilitas ke lokasi wisata.

## Nota Kesepahaman Bersama *Sustainable Blue Financing*

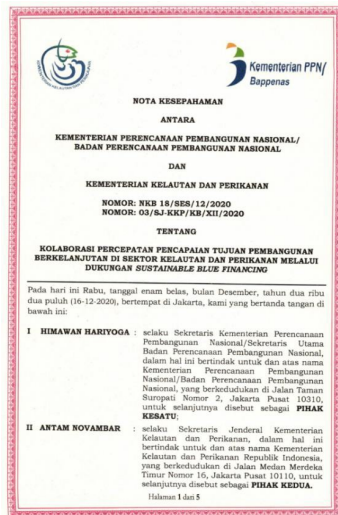
Melanjutkan proses diskusi pada kuartal ketiga lalu, ICCTF terus berkoordinasi terkait penyusunan Konsep Nota Kesepahaman Bersama (NKB) *Sustainable Blue Financing* bersama Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah beberapa pertemuan yang dilakukan untuk menyempurnakan konsep NKB dan memastikan

klausal yang terdapat dalam NKB memenuhi kebutuhan dan disepakati oleh kedua belah pihak, Nota Kesepahaman Bersama resmi ditandatangani pada 16 Desember 2020.

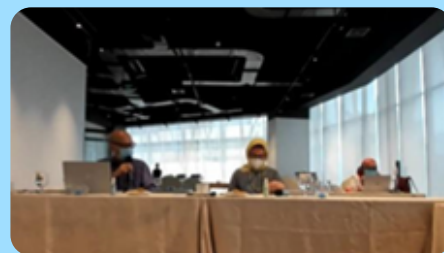
Dari pihak Kementerian PPN/Bappenas, diwakili oleh Sekretaris Menteri PPN/ Sekretaris Utama Bappenas, dan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Upaya pembentukan kerja sama ini telah dilakukan sejak bulan Juni 2020, dan ditujukan untuk memperlancar skema pendanaan melalui mekanisme *blended-finance* di sektor kelautan dan perikanan guna mendukung pengembangan pendanaan inovatif sebagai bentuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) tujuan 14: Menjaga Ekosistem Laut. Diharapkan dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama ini, dapat menjadi pintu sekaligus landasan dalam memulai kegiatan-kegiatan bersama pendanaan inovatif di sektor kelautan dan perikanan.

Rencana selanjutnya dalam merealisasikan kerja sama di bawah payung NKB ini yaitu penyusunan SPK dengan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Dan Perikanan (BLU LPMUKP) dan pelaksanaan *pilot project*. Proyek ini diharapkan dapat menjadi percontohan implementasi dan pengarusutamaan pendanaan inovatif di sektor kelautan dan perikanan. Pilot pendanaan inovatif ini akan menggapai sektor dan skala usaha dari berbagai tingkat, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pendanaan inovatif.



## Focus Group Discussion Blue Finance



ICCTF mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Tematis *Blue Finance Activity* yang dilaksanakan berseri pada 21 Oktober 2020 (sesi pertama) dan 5 November 2020 (sesi dua & tiga) bertujuan untuk mengkoordinasikan para pelaku utama, membangun konsensus dan mengidentifikasi serta menyusun usulan program untuk mengatasi kendala urgensi instrumen finansial alternatif untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sesuai dengan arah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Urgensi tersebut dirasakan oleh pemangku kepentingan di berbagai tingkat. Oleh sebab itu FGD merupakan bentuk *Knowledge-sharing Platform* bagi para tamu undangan yang diindikasikan memiliki program kerja/ kerja sama terkait *Blue Finance*.

FGD berhasil menghimpun masukan dari masing-masing perwakilan instansi, usulan program, serta isu yang muncul di tingkat akar rumput. Kesepakatan kolektif dari ketiga FGD ini diantaranya, bahwa kebutuhan pembentukan forum koordinasi dan harmonisasi *Blue Finance* sangat penting. Menjawab kebutuhan ini, Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia akan menginisiasi pembentukan sebuah platform koordinasi bertajuk *Sustainable Ocean Platform*, yang akan dipimpin oleh Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas.

## PENELITIAN BIOEKONOMI



Indonesia Climate Change Trust Fund mengadakan Rapat Koordinasi Survei Penelitian Bioekonomi pada tanggal 8 Oktober 2020 yang membahas tentang data dan isu lain yang berkembang dalam kegiatan survei perikanan udang di Laut Arafura.

Laut Arafura yang termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 dikenal dengan keberlimpahan udang dengan angka kontribusi terhadap perikanan nasional yang sangat besar yaitu 45% dan ikan demersal sebanyak 20% nasional.

Namun demikian, pengelolaan sumber daya udang mengalami tantangan dengan adanya *illegal fishing*, *overcapacity* dan belum diketahuinya tingkat optimal alokasi kapal dan manfaat sumber daya yang seharusnya diperoleh pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan berbasis *science-based policy* menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel dan mengakomodasi kompleksitas dan dinamika sumber daya dan usaha perikanan.

Dalam tiga bulan ICCTF beberapa kali mengadakan Rapat Pembahasan Hasil Penelitian Bioekonomi dengan Professor Jon G. Sutinen dan Profesor Dr. Akhmad Fauzi. Rangkaian pertemuan dilaksanakan untuk membahas model bioekonomi dan finalisasi pekerjaan kajian Bioekonomi, dari segi substansi maupun administrasi. Diharapkan model yang dapat dihasilkan adalah rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi jumlah kapal dan stok sumber daya.

Model yang dihasilkan akan diinkorporasi dalam diseminasi sebagai *output* akhir kajian. Hasil ini juga akan dicantumkan dalam *interim report*. Laporan model Bioekonomi final ditargetkan untuk dikemas dalam *policy brief* yang akan dirilis melalui konferensi pers/rilis pers oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang direncanakan dilakukan pada 2021.

## KARBON BIRU (BLUE CARBON)

Pada tanggal 6 November 2020, dilaksanakan rangkaian kegiatan *Policy Dialogue* yang kedua, yaitu *Program Committee Meeting*. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali berbagai kegiatan yang telah diimplementasikan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait pengelolaan *blue carbon* di Indonesia dan mensinergikan rencana kerja kedepan dengan mempertimbangkan dampak Covid-19. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai platform yang lebih teknis bagi para pemangku kepentingan untuk membahas strategi implementasi lintas sektor dan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan di kegiatan sebelumnya.



Selanjutnya, pada tanggal 17-19 November 2020, Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF melakukan kunjungan wisata di Desa Bulutui, Likupang, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan survey dan observasi lapangan terhadap potensi pengembangan program strategis *blue carbon* khususnya Mangrove di Likupang, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan kunjungan lapangan ini dihadiri oleh Tim Bappenas yang terdiri dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Direktur Kelautan dan Perikanan, dan Kasubdit Perikanan. Di lapangan, Tim Bappenas kemudian disambut langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan Henry Tenoch sebagai Pengelola Kawasan Mangrove dan tokoh masyarakat di Manado.

Dari hasil kunjungan ini, kondisi ekosistem mangrovenya masih sangat baik dan alami. Dengan kerapatan mangrove yang tinggi dan monokultur membuat mangrove ini membentuk gugusan pulau-pulau yang terbentang seluas 1.473 ha.

Menurut warga yang ikut serta ke lapangan, di kawasan ini sering muncul dugong atau ikan duyung karena arusnyanya yang tenang dan banyak terdapat lamun sebagai tempat mencari makan. Ekosistem lamun di sekitar Kawasan ini juga cukup potensial namun belum teridentifikasi luasnya.

## HIGH-LEVEL POLICY DIALOGUE ON INDONESIA SUSTAINABLE BLUE CARBON ECOSYSTEM 2020



*High-Level Policy Dialogue* dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkomarves, KKP, KLHK, Kemendagri, LIPI, LAPAN, Bappeda, ICCTF, Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER) Australia, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia dan Kedubes Australia.

Pada pidato pembukaannya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa penyusunan, pengembangan dan implementasi strategi *blue carbon* Indonesia memerlukan keterlibatan banyak pihak. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, swasta dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep pendekatan dalam *Sustainable Development Goals* - *inclusive*, sehingga diharapkan ada sinergi dan dapat mencapai target yang diharapkan secara optimal.

Selanjutnya, *Ambassador for the Environment, Department of Foreign Affairs and Trade Australia* mengungkapkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki ekosistem *blue carbon* pertama dan kedua terbesar di dunia. Ekosistem *blue carbon* memiliki banyak manfaat tetapi termasuk yang paling terancam di bumi. Ketika terdegradasi atau hilang, ekosistem *blue carbon* dapat menjadi sumber emisi yang signifikan.

Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem ini dengan fungsi penyimpanan karbonnya yang berkelanjutan. Dialog sebagai bagian dari koordinasi dapat membantu mengembangkan pengaturan dan pengelolaan kebijakan pemerintah yang kuat dan konsisten.

Kegiatan ini merangkum beberapa hasil di antaranya implementasi kebijakan *blue carbon* dalam perencanaan & pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multipihak (pemerintah, swasta, NGO, masyarakat, akademisi), perlunya internalisasi *blue carbon* ke dalam RPJMD dan RZWP3K, serta adanya Rencana Strategis kementerian dan lembaga dan Renja kementerian dan lembaga serta penguatan koordinasi antar institusi terkait agar kebijakan-kebijakan yang ada saat ini dapat berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, maka selesailah rangkaian kegiatan *policy dialogue* di bawah kerjasama *Indonesia-Australia Blue Carbon Program* untuk tahun 2020. Dari rangkaian kegiatan *National Blue Carbon Workshop, Program Committee Meeting* dan *High-Level Policy Dialogue*, Kementerian PPN/Bappenas telah menampung berbagai masukan baik dari tingkat nasional maupun daerah, antara lain pentingnya pelibatan semua pihak dalam penyusunan, pengembangan dan implementasi program *blue carbon* agar selaras baik di tingkat pusat maupun daerah serta perlunya payung kebijakan yang dapat diadopsi oleh semua pihak. Masukan yang ditampung ini akan menjadi dasar dalam penyusunan *roadmap blue carbon* dan kolaborasi selanjutnya di tahun 2021.

### Coastal Blue Carbon Ecosystems

- Coastal blue carbon ecosystems possess multiple benefits, but are amongst the most threatened on earth
- When degraded or lost, they can become significant emissions sources
- It is therefore important to balance the sustainable use of these ecosystems with their ongoing function of storing carbon

**Keynote Speaker: Jamie Ishbister**

---

### Blue Carbon – Climate Connection

- United Nations Framework Convention on Climate Change – Article 4
  - Promote sustainable management, and promote and cooperate in the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs – including biomass, forests and oceans as well as other terrestrial, coastal and marine ecosystems
- Paris Agreement – Article 5
  - Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse gases – including forests

### Blue Carbon – Climate Connection

MITIGATION

ADAPTATION

Blue carbon ecosystems in NDCs

**Why NDCs?**

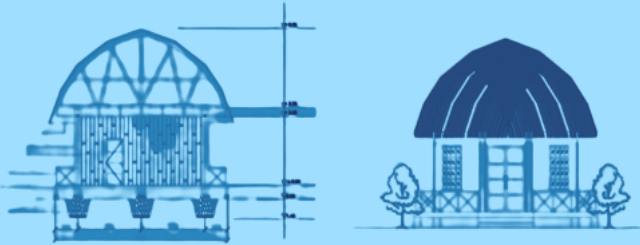
- High mitigation benefits
- High adaptation benefits
- To support NDC progression
- High implementation value – signals national policy priorities which drives action and resources
- Inventories provide the foundation for NDCs

# UPDATE MITRA PELAKSANA

**PAKET 1**


## YAYASAN TERUMBU KARANG INDONESIA (TERANGI)

- Tersedia dokumen Detail Engineering Design (DED) dan purwarupa untuk infrastruktur berikut: (i) Pusat Informasi Ekowisata (PIE), (ii) *Hiking Track*, (iii) *Jetty*, (iv) Keramba Jaring Apung, (v) Pos Pemantauan Pari Manta, dan (vi) *Mobile Cold Storage*.



- Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (SPPL) untuk infrastruktur berikut: (i) Pusat Informasi Ekowisata (PIE) di SAP Raja Ampat, (ii) Keramba Jaring Apung di KKPDP Selat Dampier, (iii) Pos Pemantauan Pari Manta di KKPDP Selat Dampier dan di SAP Raja Ampat.



- Penyusunan media dan alat bantu pembelajaran workshop rehabilitasi dan pemantauan ekosistem pesisir, serta pengelolaan kawasan konservasi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- Pendampingan kelompok dalam kegiatan usaha berbasis masyarakat.

## UPDATE PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Pembangunan infrastruktur berupa PIE di Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, Keramba Jaring Apung di KKPDP Selat Dampier dan Pos Pemantauan Pari Manta di KKPDP Selat Dampier dan di SAP Raja Ampat sudah dimulai sejak November 2020. Pembangunan dimulai dengan tahap pra konstruksi berupa pembelian peralatan dan *land clearing*.



Pelaksanaan konstruksi memperhatikan Rencana Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).



Beberapa infrastruktur lain yang rencananya akan dibangun di SAP Waigeo Sebelah Barat mengalami penundaan akibat isu sosial.



Akhir 2020 pembangunan infrastruktur tersebut direncanakan dipindahkan ke Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Misool.



## PERKUMPULAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KONSERVASI ALAM (YAPEKA)



- Workshop pemangku kepentingan terkait pariwisata serta penyusunan modul pelatihan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Nasional.
- Pengadaan peralatan pencegahan *by catch* telah dilakukan di Desa Sulamu dan Tablolong.
- Koordinasi & survei persiapan pelatihan bagi kelompok budidaya rumput laut di Desa Sotimori dan Dusun Nusa Manuk, Rote Ndao
- Pembangunan Pusat Informasi Ekowisata di Kab. Sabu Raijua & PLTS di Kab. Rote Ndao dimulai sejak November 2020 dan memasuki tahap pra konstruksi (pembelian peralatan dan *land clearing*).



- Pengadaan peralatan PLTS telah dikirimkan ke Nusa Manuk, Rote Ndao pada Desember 2020 dan diharapkan siap terpasang pada Januari 2021, sementara Pusat Informasi Ekowisata di Kab. Sabu Raijua direncanakan selesai pada akhir Februari 2020.

Tersedia dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 4 unit infrastruktur, yaitu:

1. Menara Pantau Cetacean di Desa Naikean, Kabupaten Kupang,
2. Pusat Informasi Ekowisata di Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang,
3. Pusat Informasi Ekowisata di Kabupaten Sabu Raijua,
4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Rote Ndao.

Tersedia 3 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk:

1. PIE di Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang,
2. PIE di Kabupaten Sabu Raijua
3. PLTS di Kab. Rote Ndao.



Pada 4 - 10 Oktober 2020 YAPEKA melakukan survei identifikasi lokasi menara pantau cetacean di Pulau Semau, Kab. Kupang dan Pulau Sabu, Sabu Raijua. Pembangunan menara pantau cetacean telah direncanakan oleh BKKPN Kupang dan tercantum dalam dokumen Rencana Tata Letak (Site Plan) Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Laut Sawu (2014).



## YAYASAN REEFCHECK INDONESIA (YRCI)



### Workshop Pengelolaan Hiu, Pari Manta dan Cetacea



30 November - 1 Desember 2020



(i) Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan tentang pengelolaan hiu, pari manta, dan Cetacea;

(ii) Mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait dengan kebutuhan data dan informasi untuk implementasi kegiatan; dan

(iii) Mengidentifikasi kebutuhan pengelola dan para pemangku kepentingan lainnya di kawasan TNP Laut Sawu, SAP Waigeo Barat, SAP Raja Ampat, dan KKPD Raja Ampat dalam pengembangan *platform monitoring (website dan mobile app)* untuk pencatatan hasil perikanan dan perjumpaan *Elasmobranch* dan *Cetacea*.

- Tersedia panduan pengambilan sampel genetika dari berbagai sumber (kejadian terdampar, *boat survey*, *bycatch* dan pasar) serta desain riset (termasuk protokol survei kelimpahan) untuk acuan pengambilan data.
- Tersedia SOP pemasangan *tagging* pada Cetacea yang berisi panduan pemasangan, *animal and human safety* selama proses pemasangan *tag*.
- Tersedia dokumen studi kepustakaan berupa (i) Status Perikanan Elasmobranch dan Cetacea di Papua Barat (ii) Metodologi penilaian spasial dan ekologi cetacean terdampar di Indonesia.
- Tersedia dokumen kajian literatur tentang kemunculan Cetacea di Taman Nasional Perairan (TNP Laut Sawu dan sekitarnya serta desain riset survey kapal.



## PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN (PKSPL) – INSTITUTE PERTANIAN BOGOR

### *Integrated Coastal Management (ICM) Leader Forum di Manokwari*



23 November 2020



53 orang pemangku kepentingan (pusat/daerah)



Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan pendekatan bioekonomi dalam efisiensi sumber daya.

### *Training dan Workshop Integrated Coastal Management (ICM)*



30 November – 4 Desember 2020

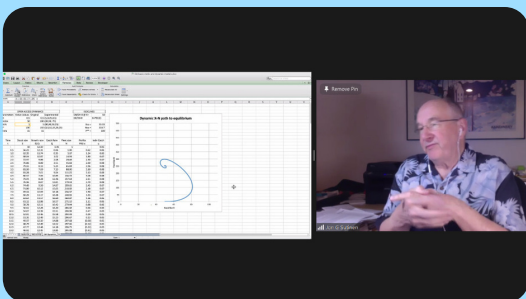


30 orang pemangku kepentingan (pusat/daerah)



Meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan pesisir terpadu untuk membantu percepatan implementasi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat.

### *Short Course: "Bioeconomic Analysis To Improve Fisheries Management Practice"*



Oktober – November 2020



44 peserta dari pemerintahan & akademisi



Meningkatkan kapasitas terkait bioekonomi yang meliputi analisis, pengembangan dan simulasi model guna mendukung implementasi RZWP-3-K demi mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan laut.

- Survei dalam pengkajian mendalam Ekosistem Mangrove, Lamun, dan Terumbu Karang.



- Kegiatan kampanye publik tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut melalui media sosial.







## YAYASAN TERUMBU KARANG INDONESIA (TERANGI)

Tersedia dokumen DED untuk 7 unit infrastruktur, yaitu:

- (i) Menara Pengawas di Meosmanggara, SAP Raja Ampat,
  - (ii) Menara Pengawas di Sawandarek, KKPD Selat Dampier,
  - (iii) Menara Pengawas di Harapan Jaya KKPD Misol,
  - (iv) Menara Pengawas di Sabu Raijua, TNP Laut Sawu,
  - (v) Menara Pengawas di Rote Ndao, TNP Laut Sawu,
  - (vi) Menara Pengawas di Sumba Barat Daya, TNP Laut Sawu,
  - (vii) Menara Pengawas di Manggarai, TNP Laut Sawu.
- Sudah tersedia 3 SPPL untuk 3 menara pengawas di Meosmanggara, Sawandarek (Raja Ampat) dan Sabu Raijua (TNP Laut Sawu).
  - Sudah tersedia DED untuk Menara Pantau Pokmaswas dan kapal pengawas.
  - 26 POKMASWAS teridentifikasi di tiga kawasan konservasi perairan yang menjadi lokasi proyek yaitu di TNP Laut Sawu, SAP Raja Ampat dan KKPD Selat Dampier.
  - 20 POKMASWAS akan didampingi untuk mendapatkan SK Provinsi.



Workshop Penyusunan Media dan Alat Bantu Ajar Pengawasan Kawasan Konservasi Berbasis Masyarakat Level 1, 2 dan 3 pada Oktober 2020

### Sertifikasi Selam Tingkat Lanjut



16 – 20 November 2020



20 peserta (18 laki-laki & 2 perempuan)



Meningkatkan kapasitas peserta untuk mendukung pengembangan wisata dan kegiatan konservasi di Raja Ampat dan Laut Sawu. Peserta berasal dari Mutus, Meosmanggara dan Waigeo.



Tahapan kegiatan sertifikasi ini terdiri dari (i) materi kelas antara lain dasar-dasar peralatan yang digunakan dalam kegiatan selam, kesehatan dalam penyelaman, penyelaman dalam, penyelaman malam, navigasi bawah air, *search and recovery* (ii) simulasi materi (iii) praktek penyelaman.



Workshop Penyusunan Media dan Alat Bantu Ajar Pemantauan Ekosistem Pesisir pada 8 – 9 September 2020 diikuti oleh 51 peserta



## YAYASAN PUSAT INFORMASI LINGKUNGAN INDONESIA (PILI)

### **Serial Diskusi Pembentukan POKJA KMHA di Rote Ndao dan Raja Ampat**



Teridentifikasinya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Raja Ampat dan Laut Sawu, kemudian terjadi disepakati untuk membentuk POKJA/Forum KMHA dengan menerbitkan SK dari pemerintah daerah setempat.



Dari hasil diskusi didapatkan hasil bahwa Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Bangsa (FKTAPB), Dewan Adat Suku (DAS) Maya, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Betew Kafdarun serta stakeholder menyambut kegiatan COREMAP-CTI



FKTAPB bersama PILI akan memetakan potensi masyarakat dan mengumpulkan perwakilan Manaholo desa sebagai proses sosialisasi kegiatan ini. Harapan besar dari PILI adalah bisa membantu memperkuat kelembagaan forum adat ini untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Misalnya dengan membuat program yang mengapresiasi para Manaholo yang telah sukarela mengawasi pengelolaan laut di masing-masing wilayah desanya.

### **Workshop Diseminasi Hasil Kajian Bioekonomi Udang di WPP 718**



9-10 September 2020 secara *hybrid*



99 peserta (75 laki-laki & 24 perempuan) dihadiri perwakilan akademisi, praktisi, dan pemerintah

### **Pelatihan Kajian Kelayakan Partisipatif di TNP - Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat**



September 2020



60 peserta (48 laki-laki & 12 perempuan), Perwakilan KMHA; Pokja/Panitia KMHA; dan UPT pengelola TNP-LS dan SAP-KRA (BKKPN Kupang)

## PELAKSANAAN BEASISWA MASTER PROGRAM COREMAP-CTI ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)



### **Rapat Persiapan Pre-departure Course Master Degree**

Seiring dengan proses penandatanganan MoU dan seleksi para calon karyasiswa, pada bulan Desember 2020, ICCTF melakukan koordinasi dengan Institut Pertanian Bogor dan The University of Queensland, Australia untuk melakukan pendaftaran para karyasiswa.

Hingga saat pembukaan pendaftaran, hanya dua calon karyasiswa yang memenuhi syarat. Sementara dua calon karyasiswa lainnya belum berhasil memasuki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengikuti perkuliahan di The University of Queensland. Hingga akhir tahun 2020, baru dua calon karyasiswa yang melakukan pendaftaran di The University of Queensland secara mandiri. Sebagaimana saran dari pihak The University of Queensland, dua karyasiswa tersebut akan diproses sebagai *sponsored student* (mahasiswa penerima beasiswa internasional) melalui proses pendaftaran secara resmi oleh IPB.

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak The University of Queensland, para mahasiswa program beasiswa Proyek COREMAP-CTI ADB akan mengikuti perkuliahan Semester 1, 2021 secara online karena kondisi pandemi Covid-19, dan diharapkan mengikuti perkuliahan secara tatap muka (offline) pada semester berikutnya sesuai dengan perkembangan kondisi Covid 19 di Indonesia maupun di Australia.

## PAKET PENGADAAN PERUSAHAAN KONSULTAN COREMAP CTI ADB

Pelaksanaan COREMAP-CTI ADB hingga kuartal ini sudah sampai pada pemilihan Perusahaan Konsultan untuk menjalankan paket pekerjaan hibah (grant package) yang terdiri dari enam paket di tiga lokasi proyek yaitu Nusa Penida, Gili Matra dan Gili Balu. Sehingga pelaksanaan kegiatan proyek di setiap lokasi proyek dilaksanakan melalui dua perusahaan konsultan. Metode pengadaan yang digunakan adalah Bio Technical Proposal (BTP) untuk enam Grant package terdiri dari:

Grant Package 1	Support for Marine Protected Area (MPA) and Endangered Threatened Species (ETP) National Plan of Action (NPAO) Implementation in Nusa Penida, Bali
Grant Package 2	Support for Marine Protected Area (MPA) and Endangered Threatened Species (ETP) National Plan of Action (NPAO) Implementation in Gili Matra, Nusa Tenggara Barat
Grant Package 3	Support for Marine Protected Area (MPA) and Endangered Threatened Species (ETP) National Plan of Action (NPAO) Implementation in Gili Balu, Nusa Tenggara Barat
Grant Package 4	Support for Ecosystem-based resource management plans and sustainable marine-based livelihoods in Nusa Penida, Bali
Grant Package 5	Support for Ecosystem-based resource management plans and sustainable marine-based livelihoods in Gili Matra, Nusa Tenggara Barat
Grant Package 6	Support for Ecosystem-based resource management plans and sustainable marine-based livelihoods in Gili Balu, Nusa Tenggara Barat

## Dialog Masyarakat Kampung Arborek

Rangkaian acara Kick-off COREMAP-CTI World Bank dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Dialog bersama masyarakat dilakukan di Kampung Arborek pada 14 November 2020, bertujuan untuk menggali informasi tentang pemanfaatan sumber daya laut yang dikembangkan untuk mendukung pengembangan ekowisata di Kampung Arborek. Selanjutnya untuk dialog dengan para pemangku kepentingan dilakukan di Waisai pada tanggal 16 November 2020 bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendapatkan masukan terkait dalam impementasi COREMAP-CTI di Raja Ampat.



[www.icctf.or.id](http://www.icctf.or.id)

 Indonesia Climate Change Trust Fund

 ICCTFofficial

 ICCTF\_ID

 ICCTFofficial

Lippo Kuningan 15th Floor Unit D-E  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12,  
Jakarta 12940, Indonesia  
Phone: (+62 21) 80679386  
(Hunting)  
Fax : (+62 21) 80679387  
Email: [secretariat@icctf.or.id](mailto:secretariat@icctf.or.id)